

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO  
dengan  
KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA  
CABANG KOTA GORONTALO**

NOMOR : 13/HK.02.00/K.GO-06/07/2022  
NOMOR : 050/B/75.71 - KMHDI/VII/2022

**TENTANG  
PARTISIPASI ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM PENGAWASAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA GORONTALO**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : LISMAWY IBRAHIM, S.Pd.,M.Pd.  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Gorontalo  
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : I WAYAN GEDE SANDIKA  
Jabatan : Sekretaris PC KMHDI Gorontalo  
Alamat : Jl. Pangeran Hidayat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Cabang Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Gorontalo dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Cabang Kota Gorontalo selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif dikalangan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
2. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo adalah Lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Gorontalo.

3. Bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kota Gorontalo yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan Organisasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDl) Cabang Kota Gorontalo.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman bersama ini adalah memperkuat dan mendorong peran partisipasi masyarakat khususnya peran organisasi kepemudaan dalam pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Gorontalo;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut aktif melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kegiatan dalam :

1. Meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat yang dilandasi cita-cita luhur dan itikad baik untuk berkarya untuk kemajuan Pendidikan hukum politik di Indonesia, khususnya di Kota Gorontalo;
2. PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan tempat dan waktu kepada PIHAK KESATU dalam melakukan edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan dalam hal pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Organisasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDl) Cabang Kota Gorontalo;
3. PIHAK KESATU Akan mendukung secara moril dan materil kepada PIHAK KEDUA dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum 2024 di Kota Gorontalo
4. PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama menolak Politisasi Sara, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (Hoax) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. PARA PIHAK sepakat menolak adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang dapat merusak tatanan berdemokrasi di Indonesia.



Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun selama Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dihitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kesepahaman bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Gorontalo



LISMAWY IBRAHIM, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA

Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma  
Indonesia Cabang Kota Gorontalo



I WAYAN GEDE SANDIKA